



RANCANGAN AKHIR
RENJA
PERANGKAT DAERAH



PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM
KEBAKARAN

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini tersusun berkat kerjasama semua pihak, dan melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan partisipasinya.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja (Renja) ini belum sempurna dan mungkin belum sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan isi dan substansinya, kami mohon maaf dengan harapan dapat menerima masukan untuk perbaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) pada masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini berguna dalam proses perencanaan anggaran untuk tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 27 Juni 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan,**



Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP 19650909 198602 1 00

DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	16
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	52
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V PENUTUP	103
A. Catatan Penting	103
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	103
C. Rencana Tindak Lanjut	103

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dinas sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bahwa yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran di daerah adalah urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan melalui pengkajian kondisi empiris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, hal ini tentang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan pedoman

agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran pada Rencana Kerja. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program/kegiatan, target indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena rencana kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan kegiatan tahunan ke dalam langkah yang lebih konkrit dan terukur. Oleh karena itu rencana kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kualitas dokumen rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, yang pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang;
6. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100)
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam

- Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 90);
 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu tahun, dalam penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi, maka rencana stratejik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

a. Maksud

Penyusunan rencana stratejik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan

program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diimbun oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat agar terwujud keberhasilankolaboratif secara sinergisitas.

b. Tujuan

1. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi SKPD.

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Visi yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

**“KALIMANTAN SELATAN MAJU (MAKMUR, SEJAHTERA,
DAN BERKELANJUTAN)”**

Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudi Pekerti Luhur;
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata;
3. Memperkuat Sarana Dan Prasarana Dasar Dan Perekonomian;
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Fokus Pada Pelayanan Publik;

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, merupakan dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada pematapan fondasi pembangunan daerah, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD memiliki peran pada misi misi keempat yaitu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Fokus Pada Pelayanan Publik, dengan prioritas mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan perlindungan masyarakat. Peran yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Visi RPJMD Terkait RPJMD	Misi RPJMD Terkait Satpol PP dan Damkar	Sasaran RPJMD Terkait Satpol PP dan Damkar	Indikator RPJMD Terkait Satpol PP dan Damkar
1	2	4	5
Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera, Dan Berkelanjutan	<p>Misi ke empat: Meningkatkan etos kerja, moralitas, sikap, disiplin dan kreatifitas serta keperdulian kepada masyarakat dengan ketenteraman dan ketertiban umum untuk Kalsel Aman</p> <p>Prioritas: Mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan</p>	Mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan mengurangi dampak bahaya kebakaran	<p>1. Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah</p> <p>2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non Kebakaran</p>

	ketentramandan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan perlindungan masyarakat		
--	---	--	--

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan, berisi **latar belakang** berupa pengertian ringkas tentang: Rencana kerja (Renja) SKPD, proses penyusunan rencana kerja SKPD, keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan dokumen RKPD, rencana strategis (Renstra) SKPD, dengan rencana kerja K/L dan rencana kerja Provinsi dan rencana kerja Kabupaten/Kota, tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, dengan menyebutkan **landasan hukum** berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, penetapan SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD.

Menjelaskan **maksud dan tujuan** penyusunan rencana kerja SKPD sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan SKPD. Selain itu memaparkan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu, dan realisasi rencana strategis SKPD mengacu pada hasil laporan kinerjatahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

c. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini yaitu hasil proses rancangan awal yang digunakan untuk membandingkan rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategis SKPD. Penjabaran dan rekapitulasi program dan kegiatan dengan mempertimbangkan perumusan program.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menjelaskan mengenai program dan kegiatan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Bab ini juga disajikan tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja rencana strategis SKPD.

Bab V Penutup, uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan tanda tangan Kepala SKPD serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator sasaran dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Hasil pengukuran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel TC 29: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis SKPD sampai dengan Tahun 2024

Tabel T- C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)**

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan								

1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar										
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0%	5 Dokumen	15 Dokumen	50%		
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%		
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar										
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	36 bulan	12 bulan	0 bulan	0%	12 bulan	36 bulan	50%		
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	12 Dokumen	36 Dokumen	50%		
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar										
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	3 Paket	50%		
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0%	5 Orang	0 Orang	0%		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar										
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	36 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	12 Paket	36 Paket	50%		
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	36 Paket	0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	0 Paket	36 Paket	50%		

1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	36 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	12 Paket	36 Paket	50%
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	18 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	12 Dokumen	18 Dokumen	50%
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	36 Laporan	50%
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar								
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31 Unit	11 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	11 Unit	35%
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	3 Paket	0 Paket	0%	3 Paket	4 Paket	33%
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	76 Unit	40 Unit	11 Unit	0 Unit	0%	11 Unit	40 Unit	53%
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar								
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	36 Laporan	50%
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	36 Laporan	50%

1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar										
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	108 Unit	38 Unit	18 Unit	0 Unit	0%	18 Unit	38 Unit	35%		
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	144 Unit	61 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	61 Unit	42%		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah										
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti										
1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%		
1.05.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	65 Unit	41 Unit	16 Unit	0 Unit	0%	16 Unit	41 Unit	63%		

1.05.02.1.01.14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
1.05.02.1.01.15	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	65	Laporan	26	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0%	4	Laporan	26	Laporan	40%
1.05.02.1.01.16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	3	Laporan	50%
1.05.02.1.01.17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	72	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	36	Laporan	50%
1.05.02.1.01.18	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	810	Orang	405	Orang	135	Orang	0	Orang	0%	135	Orang	405	Orang	50%
1.05.02.1.01.19	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	24	Laporan	40%

		yang Dilakukan Penindakan														
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah														
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	6	Laporan	50%
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	20	Laporan	8	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0%	4	Laporan	8	Laporan	40%
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	24	Laporan	12	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0%	4	Laporan	12	Laporan	50%
1.05.02.1.02.06	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	Dokumen	40%
1.05.02.1.02.09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	Dokumen	40%
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan trantibum														

1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	2	Laporan	40%
1.05.02.1.03.03	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	Dokumen	0%
1.05.02.1.03.05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan		0	Laporan	0	Laporan	0%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran														
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tingkat responsibilitas aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang sigap dan terampil														
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	Dokumen	50%
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	3	Laporan	50%
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	20	Unit	17	Unit	73	Unit	0	Unit	0%	73	Unit	90	Unit	450%

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di atas dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Berikut Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi belum ada realisasi karena sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%. Pada tahun ini untuk sub kegiatan ini tidak dilakukan penganggaran dikarenakan untuk bahan bakar minyak baik roda dua maupun roda empat sudah include ke dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan dialokasikan ke masing-masing bidang sub kegiatan terkait.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 35%, sub kegiatan ini belum mencapai target rencana kerja yang ditentukan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.
- Pengadaan Mebel Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 33%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub

kegiatan ini sebesar 53%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 35%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 42%, capaian sub kegiatan ini terbilang rendah dikarenakan adanya perubahan target pada tahun 2021.

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Berikut Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 63%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian

sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.

b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan..
- Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.
- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 40%, capaian sub kegiatan ini masih rendah dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru.
- Pembentukan Sekretariat PPNS belum ada realisasi karena sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru.

- Dukungan Operasional Sekretariat PPNS belum ada realisasi karena sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berikut Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%.
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 50%.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Dengan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada sub kegiatan ini sebesar 450%, sub kegiatan ini melebihi target rencana kerja yang ditentukan dikarenakan keterbasan anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 - 2026, maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel T- C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n - 2)	Tahun 2023 (n - 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n + 1)	Tahun 2022 (n - 2)	Tahun 2023 (n - 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	91,07	96,66%	100%	100%	

		penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi											
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan terkukuhkan											
	3	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi											
	4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan											
	5	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS											
	6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan gangguan Trantibum											
2.	Indikator Kinerja PD												
	1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum		75	85	90	90	75	85	90	90		

2	Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan peyelidikan			75	85	90	90	75	85	90	90	
3	Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum			85	90	90	90	85	90	90	90	
4	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum			85	90	90	90	85	90	90	90	
5	Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			90	100	100	100	90	100	100	100	

6	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparaturSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel			90	100	100	100	90	100	100	100	
7	Meningkatkan tanggungjawab dan tanggungjawab terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana			40	50	50	60	40	50	50	60	
8	Meningkatkan peran Satlinmas dan Damkar			40	50	50	60	40	50	50	60	

Hasil pencapaian indikator sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Produk Hukum Daerah

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan penduduk yang heterogen, dan sangat rawan atas timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Kegiatan dalam mendukung upaya pengamanan dan penertiban tersebut antara lain patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya Pemerintah Daerah, melaksanakan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menindaklanjuti permasalahan yang terjadi untuk diselesaikan/permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditindaklanjuti dengan **realisasi capaian kinerja 85%**

2. Meningkatkan Peran Petugas Penegak Produk Hukum Dalam Penyidikan dan Penyelidikan

Peran aktif penyidik (PPNS) untuk penyelidikan dalam menegakkan Produk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, agar Produk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dipedomani oleh masyarakat/aparatur, **dengan realisasi capaian kinerja 85%**

3. Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mencegah tindak kriminal dengan mengoordinasikan, membina dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

terhadap masyarakat/aparatur, agar memahami/mematuhi terkait sanksi dan pidana akibat dari pelanggaran yang dilakukan, **dengan realisasi capaian kinerja 90%**

4. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan Mengenai Ketertiban Umum

Penyelenggaraan penegakan Produk Hukum tentang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh aparatur penegak agar dalam mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat/aparatur dan lembaga/organisasi terhadap peraturanserta paham dalam upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, **dengan realisasi capaian kinerja 90%**

5. Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pengembangan kapasitas personel satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan pelatihan dan pelaksanaan pembinaan kedisiplinan, kesiapan, kesiagaan dan kesigapan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran untuk kesamptaan, agarkapasitas personel satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran profesional dibidangnya dan sesuai standar ketentuan/bersertifikat, **dengan realisasi capaian kinerja 100%**

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalsel

Pengembangan kualitas personel satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan peningkatan pendidikan SDM bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, agar klasifikasi personel satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran meningkat, **dengan realisasi capaian kinerja 100%**

7. Meningkatkan Responsibilitas Terhadap Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bahaya Kebakaran dan Bencana

Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan, membina,

mengatur dan mengendalikan penanganan bencana, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesiagaan dan kesiapan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, guna meningkatkanresponsibilitas aparaturnsatuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota menjadi sigap dan terampil, **dengan realisasi capaian kinerja 50%**

8. Meningkatkan Peran Satlinmas dan Damkar

Satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan ketertiban umum, bahaya kebakaran dan bencana, agar dampak akibat dari permasalahan tersebut dapat dikurangi karena adanya peran aktif dari satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota, **dengan realisasi capaian kinerja 50%.**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

2.3.1. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Hasil Evaluasi

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan dimasa lalu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu sudah menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan

prioritas dan sasaran.

2.3.2. Uraian koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dan faktor eksternal yang ada diluar kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan seperti Dinamika Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya. Koordinasi dan sinergi program antar perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di tingkat pusat dilakukan dengan diselenggarakannya Rakortekbang dengan usulan-usulan dari daerah untuk pemerintah dengan memperhatikan pengaturan dan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi belum berdasarkan urusan menjadi kewenangan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Permasalahan yang sering muncul mungkin menjadi perbedaan yaitu nomenklatur masing-masing organisasi berbeda sampai dengan kepada unit eselon yang terendah antar daerah sangat variatif, dan hal-hal yang sangat teknis yang pada umumnya menghambat pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi.

2.3.3. Penjelasan Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra dan Indikator Yang Sudah Ditentukan Dalam NSPK/SPM/IKK Sesuai Dengan Permendagri 18/2020

SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas yang merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Trantibunlinmas 1 (satu) pelayanan dasar yaitu :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Tramtibunlinmas diatur dalam :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

b. Lampiran IV Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Tranibum meliputi:

a. Standar pelayanan prosedur Satpol PP

b. Standar sarana prasarana Satpol PP

c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan

d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tramtibunlinmas dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang Tramtibunlinmas Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2023 terlihat pada tabel berikut :

**Capaian SPM Bidang Tranibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2023**

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	79,83%	2021	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
		91,07%	2022	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
		96,66%	2023	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.

Kenaikan angka capaian realisasi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu (lihat lampiran) dikarenakan oleh dukungan dan keaktifan jumlah PPNS Penegak PERDA pada SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. (Jumlah PPNS Penegak Perda Tahun 2023 sebanyak 44 orang, dan pada Tahun 2022 sebanyak 44 orang). Yang seharusnya Kepala Daerah kab/kota mempersiapkan tenaga PPNS minimal 7 orang untuk mencapai target yang diarahkan Kemendagri Pusat. Dengan keterbatasan tenaga PPNS Penegak PERDA, yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan atas gangguan TRANTIBUMLINMAS serta penegakan PERDA PERKADA, hal ini yang mengakibatkan proses tindak lanjut atas aduan gangguan/penindakan

TRANTIBUMLINMAS tidak terhambat.

Berkurangnya Jumlah PPNS Penegak PERDA di Kabupaten/Kota disebabkan oleh rotasi/mutasi pejabat struktural dan non struktural dan memasuki masa usia pensiun. Pada tahun 2023, penguatan PPNS melalui penambahan personil PPNS sesuai standar minimal serta peningkatan kapasitas PPNS akan dilaksanakan secara berkala.

2.3.4. Uraian Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Gubernur

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan telah disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana tugas pembantuan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam implementasinya bukan sesuatu yang mudah, oleh karena itu perlunya membangun komitmen dan strategi yang didasarkan atas visi dan misi dari SKPD yang harus di capai. Visi dan misi yang telah di rumuskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai pendukung suksesnya pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah.

Paraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur mempunyai tujuan, baik yang bersifat pengaturan maupun penataan. Oleh sebab itu apabila semua ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak ditaati oleh semua pihak yang terkait, maka akan berakibat dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah. Pada Provinsi Kalimantan Selatan di era Otonomi Daerah yang mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan

data yang ada telah menerbitkan sebanyak 182 dokumen Peraturan Daerah dan 347 dokumen Peraturan Gubernur.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang tertib, aman dan tenteram, taat dan patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta segala kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang demokratis guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat lebih konsentrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengawal dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut dengan baik, dengan upaya selalu meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan kewenangan yang didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan sebagai gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan kedepan. Adapun komitmen yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan peran aktif Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Menambah anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan;
3. Meningkatkan kemampuan kapasitas SDM;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai keperluan;
5. Berupaya mendapatkan dana operasional sesuai kebutuhan;
6. Mengisi jabatan fungsional sesuai keperluan dan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Menghimpun dan mempelajari, menginventarisir, dan mengevaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap eksistensi dan

pelaksanaannya;

9. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang terkait, melakukan pengendalian dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dengan baik.

Dari 9 komitmen tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kekuatan (Strength) yang ada baik secara internal maupun eksternal, serta memanfaatkan peluang (Opportunities) yang dimungkinkan dapat didaya gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semua unsur kekuatan akan mampu mengatasi kelemahan (Weaknesses) yang ada, dan memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam rangka menghadapi tantangan atau ancaman (Threat), sehingga akan diperoleh tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah yang akan dicapai.

Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan adanya arah kebijakan ini, Pemerintah Pusat mengharapkan perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam upayanya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan masih menemui **beberapa permasalahan/kendala** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi sinergitas kamtramtibum lintas Kabupaten/Kota

dan Provinsi

2. Belum optimalnya pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi, patroli ketentraman dan ketertiban umum, Pengamanan Pejabat Negara dan VIP
3. Banyaknya kejadian kebakaran di Kalimantan Selatan
4. Kurangnya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran
5. Kurangnya aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial
6. Kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar menurunnya tindak pelanggarannya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
7. Kurangnya anggota polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan jabatan fungsional PPNS yang bersertifikasi.

2.3.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan telaahan pada Renstra Kementerian sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis dilakukan atas faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Internal	Strength	Weakness
Eksternal	Opportunity	Threats

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, mandiri dan sejahtera.

Dinamika perkembangan lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, lingkungan strategis K/L pengelola urusan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Tantangan

- a. Pemenuhan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja
- b. Kualitas sumber daya aparatur (Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota
- c. Kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum
- d. Peran petugas penegak produk hukum dalam penyidik dan penyelidikan
- e. Penyelesaian permasalahan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
- f. Kepatuhan aparatur, masyarakat, lembaga/organisasi terhadap peraturan
- g. Responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta bahaya kebakaran dan bencana
- h. Peran Satlinmas dan Damkar dalam menghadapi kejadian yang terjadi pada suatu daerah.

2. Peluang

Peluang yang dapat digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah, yaitu:

- a. Sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja yang bersertifikat dan meningkat kualifikasinya,

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur (Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Provinsi Kalimantan Selatan dengan pelatihan teknis dan fungsional, uji kompetensi dan kesemampuan, baik untuk Provinsi ataupun fasilitasi peningkatan SDM aparatur di Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum, baik peraturan daerah dan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
- d. Petugas penegak produk hukum berperan aktif dalam penyidik dan penyelidikan
- e. Permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diselesaikan dan dikurangi dampak dari resikonya dengan peran aktif dari Satlinmas
- f. Meningkatkan kepatuhan aparatur, masyarakat, lembaga/organisasi terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
- g. Meningkatkan peran aktif Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana.

2.3.6. Penjelasan Tindak Lanjut Dalam Perumusan Program

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan

hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

Berdasarkan Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan yaitu:

1. Kurangnya kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran
3. Kurang maksimalnya pelayanan dan pengamanan terhadap ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan kebakaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tujuan program ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu melaksanakan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara, mensosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban umum dan memfasilitasi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi. Beberapa kegiatan yang mendukung program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain:

- 1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan nilai pagu Rp 99.989.200 dengan tujuan pembentukan Tim Kerjasama Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan serta hibak pilkada untuk TNI/POLRI .

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp 767.370.000 dengan tujuan Terpenuhinya sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam kegiatan penegakan trantibum tranmasy.

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dengan nilai pagu Rp 80.000.000 dengan tujuan Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kab/kota terkait.

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan nilai pagu Rp 80.000.000 dengan tujuan Menyediakan layanan akibat dari dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, salah satunya dalam jarak radius 50 meter dari lokasi penegakan.

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan nilai pagu Rp. 774.999.800 Tujuan kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu mensosialisasi/bimtek daerah rawan masalah sosial, melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya aparatur satlinmas.

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dengan nilai pagu Rp. 17.332.778.799, umumnya program ini kebanyakan membayar honorarium

petugas pendukung kantrantibmas / piket dari non PNS yang berjumlah 198 orang tetapi kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum baik berupa Pengamanan/penegakkan Peraturan Daerah atau kegiatan Patroli wilayah serta Patroli Damkar sehingga diharapkan situasi yang kondusif di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan patroli pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi dan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara/VIP, yaitu wilayah/daerah yang dilaksanakan patrol untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan juga fasilitasi terhadap keamanan di Provinsi Kalimantan Selatan yang bersinergitas dengan jajaran TNI -POLRI.

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan nilai pagu Rp 893.878.800 Tujuan kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kapasitas personel Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bersertifikat dan meningkat klasifikasinya. Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur, Tujuan dari Kegiatan ini yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Prov Kalsel dan aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mendapatkan uji kompetensi dan fungsional.

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan nilai pagu Rp 100.000.000 dengan tujuan Melakukan penindakan gangguan trantibum dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan tetap bekoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganannya.

- 1.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 150.000.000 tujuan kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yaitu melaksanakan sosialisasi produk hukum terkait sanksi administrasi dan pidana, pembinaan terhadap sekretariat/PPNS, penegakan produk hukum daerah dan memfalisitasi permasalahan terhadap pelanggaran produk hukum daerah. Beberapa kegiatan yang mendukung program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 125.000.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 59.820.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang meliputi sanksi administrasi dan pidana, pembinaan terhadap, penegakan produk hukum daerah dan pelanggaran produk hukum daerah.

Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan nilai pagu Rp 60.000.000 dengan tujuan tersusunnya SOP yang berkaitan dengan ketentuan pelayanan dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan gubernur.

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan nilai pagu Rp 96.040.000 tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif.

1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub

kegiatan :

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan nilai pagu Rp 50.000.000 tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kapasitas pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.

Pembentukan Sekretariat PPNS dengan nilai pagu Rp 30.000.000 sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru yang mana tujuan kegiatan ini yaitu Pembentukan Sekretariat PPNS yang berdasar pada Surat Keputusan Kepala Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.

Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dengan nilai pagu Rp 39.768.000 sub kegiatan ini adalah usulan sub kegiatan baru yang mana tujuan kegiatan ini yaitu Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Tujuan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran kegiatan ini adalah mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana dan kesiagaan, kesiapan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu mensosialisasi daerah rawan bencana, melaksanakan pembinaan terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran, memfasilitasi penanganan bahaya kebakaran dan dampak kebakaran dan memonitor wilayah rawan kebakaran dan dampak bahaya kebakaran. Kegiatan yang mendukung program pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana, yaitu responsibilitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota yang sigap dan terampil dan meningkatkan peran satlinmas dan Damkar.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

2.1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :

Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan

Kebakaran dengan nilai pagu Rp 648.470.000 tujuan dari kegiatan ini adalah Fasilitasi penanganan bahaya kebakaran dan dampak kebakaran, yaitu kejadian kebakaran yang di fasilitasi penanganannya.

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan nilai pagu Rp 2.050.000.000 tujuan dari kegiatan ini adalah Pembinaan terhadap sumberdaya aparatur pemadam kebakaran baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,yaitu anggota pemadam kebakaran yang terampil dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan nilai pagu Rp 50.000.000 dengan tujuan Terpenuhinya sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri untuk memenuhi standar keselamatan personil di lapangan.

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		11.951.213.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		Rp16.783.570.670	
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan		23.999.900	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan		Rp38.799.000	
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp24.334.500	
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.999.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp14.464.500	
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel		9.147.900.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel		Rp14.795.951.470	
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	8.970.900.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	Rp14.609.351.470	

1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	177.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp186.600.000	
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		216.380.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani		Rp156.380.000	
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	156.380.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp156.380.000	
1	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		1.082.684.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani		Rp632.550.000	
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp56.202.000	
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	365.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.697.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp36.430.000	
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	11.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp17.000.000	
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	639.987.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp522.918.000	
1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		743.897.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani		Rp268.756.200	
1	5	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	572.650.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Rp97.509.000	

1	5	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	52.447.200	Pengadaan Mebel	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Rp52.447.200	
1	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	118.800.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Rp118.800.000	
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		199.311.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani		Rp534.480.000	
1	5	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp52.000.000	
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.311.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp482.480.000	
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar		537.040.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani		Rp356.654.000	
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	262.590.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Rp287.894.000	
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	274.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp68.760.000	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah		21.412.252.850	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah		Rp20.739.644.599	
1	5	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti		20.851.624.850	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti		Rp20.129.016.599	

1	5	2	1.01	6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	150.000.000	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Rp99.989.200
1	5	2	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Kota Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	3 Unit	565.954.800	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kota Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	14 Unit	Rp767.370.000
1	5	2	1.01	14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Rp80.000.000
1	5	2	1.01	15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	13 Laporan	60.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Rp80.000.000
1	5	2	1.01	16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	869.643.500	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	Rp774.999.800

1	5	2	1.01	17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	17.804.635.750	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	Rp17.332.778.799
1	5	2	1.01	18	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	135 Orang	997.890.800	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	135 Orang	Rp893.878.800
1	5	2	1.01	19	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	253.500.000	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	Rp100.000.000
1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparat yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah		510.628.000	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparat yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah		Rp490.860.000
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	125.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	Rp150.000.000

1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	100.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Rp125.000.000	
1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	125.628.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	Rp59.820.000	
1	5	2	1.02	6	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	60.000.000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	Rp60.000.000	
1	5	2	1.02	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	100.000.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	Rp96.040.000	
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan trantibum		50.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan trantibum		Rp119.768.000	
1	5	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	50.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Rp50.000.000	

1	5	2	1.03	3						Pembentukan Sekretariat PPNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	Rp30.000.000	
1	5	2	1.03	5						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	Rp39.768.000	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		2.500.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		Rp2.748.470.000	
1	5	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Tingkat responsibilitas aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang sigap dan terampil		2.500.000.000	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Tingkat responsibilitas aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang sigap dan terampil		Rp2.748.470.000	
1	5	4	1.01	22	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Rp648.470.000	
1	5	4	1.01	23	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.050.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp2.050.000.000	

1	5	4	1.01	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	Rp50.000.000		
TOTAL PAGU ANGGARAN									35.863.465.850	TOTAL PAGU ANGGARAN					Rp40.271.685.269	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T- C.32

**USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pemerintah telah menyusun sasaran pokok RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah tata kelola dan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam:

1. Pemantapan politik dalam negeri melalui meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; dan
2. Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dengan agenda prioritas membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah disusun misi ke dua RPJM 2021-2026, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik, dengan tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun antara lain:

1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik;
2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Untuk mewujudkan capaian dari misi empat RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan pada rencana kerja tahun 2023 akan melaksanakan sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Gambar 3.1

Keterkaitan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Misi RPJPN 2005-2025	Misi Pembangunan 2015-2019	9Agenda Prioritas (Nawa Cita)	Isu Prioritas RPJMN 2015-2019	Arah Kebijakan RKPD 2020	Target Pembangunan RKPD 2020	Renja SKPD Satpol PP dan Damkar 2020	Program Prioritas RKPD 2020
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.	Pemantapan Politik dalam Negeri melalui meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil	Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi dengan nilai Lakip A	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
			Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran
					Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	
						Program Perlindungan Masyarakat	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

a. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan mendukung terwujudnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (2021-2026) yaitu:

**“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan
Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI
GERBANG IBUKOTANEGARA”**

Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tertuang dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah, yaitu masyarakat/aparatur yang paham/patuh produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun **sasaran** yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah **tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah**, dengan indikator:

- 1.1. Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditindaklanjuti
- 1.2. Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan ketentraman dan ketertiban umum
- 1.3. Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum
- 1.4. Persentase PPNS/Sekretariat dalam penyidikan dan penyelidikan.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, yaitu kesadaran masyarakat pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan akan dampak yang ditimbulkan dari bahaya kebakaran. Adapun **sasaran** yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah **tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran**, dengan indikator:

- 2.1. Tingkat responsibilitas aparatur satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota yang sigap dan terampil
- 2.2. Persentase satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten/Kota yang aktif dalam penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana
- 2.3. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bersertifikat
- 2.4. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meningkatkan klasifikasinya.

3.3. Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas yang merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Trantibumlinmas 1 (satu) pelayanan dasar yaitu :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b. Lampiran IV Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urursan Tranibum meliputi:

- a. Standar pelayanan prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 dijabarkan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari dana Belanja Langsung APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dengan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub

Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Total alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 16.783.570.670 dengan kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 24.334.500 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 14.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 14.464.500 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 9.999.900, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 14.609.351.470 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 8.970.900.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 186.600.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 177.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 156.380.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 156.380.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 56.202.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 48.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sejak tahun 2024 sub kegiatan ini tidak dilakukan penganggaran dikarenakan untuk bahan bakar minyak baik roda dua maupun roda empat sudah include ke dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan dialokasikan ke masing-masing bidang sub kegiatan terkait.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 36.430.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 18.697.900, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 11.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 522.918.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 699.987.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 97.509.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 572.650.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Pengadaan Mebel
Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 52.447.200 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.447.200, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 118.800.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 118.800.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 52.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 40.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 482.480.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 159.311.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 287.894.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 262.590.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 68.760.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 274.450.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Total alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 21.670.015.230 dengan kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 99.989.200 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 150.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 767.370.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 565.954.800, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 150.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 60.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 774.999.800 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 869.643.500, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.332.778.799 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 17.804.635.750, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 893.878.800 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 997.890.800, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 253.500.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan:

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 125.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 59.820.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 125.628.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 60.0000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 96.040.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pembentukan Sekretariat PPNS

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 39.768.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 50.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Total alokasi anggaran untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 2.748.470.000 dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 648.470.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 200.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.050.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 2.050.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Alokasi Dana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 250.000.000, dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TABEL TC-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
							Rencana Tahun 2025						Perkiraan Tahun Maju Tahun 2026			
							Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									40.271.685.269				35.438.465.850		
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								40.271.685.269				35.438.465.850		
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan										Rp16.783.570.670		11.586.213.000

1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan										Rp38.799.000					23.999.900
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan dan Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Kota Banjarbaru	100%	5 Dokumen	100%	Rp24.334.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%					14.000.000
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Banjarbaru	100%	1 Dokumen	100%	Rp14.464.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%					9.999.900
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel															9.147.900.000

1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	144 Orang/Bulan	100%	Rp14.609.351.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) & DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	8.970.900.000
1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	12 Dokumen	100%	Rp186.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	177.000.000
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani							Rp156.380.000					156.380.000
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	1 Paket	100%	Rp156.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	156.380.000
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani							Rp632.550.000					777.684.900
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	12 Paket	100%	Rp56.202.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	48.000.000
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	12 Paket	100%	Rp36.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	18.697.900

1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	12 Dokumen	100%	Rp17.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	11.000.000
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	12 Laporan	100%	Rp522.918.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	699.987.000
1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani							Rp268.756.200					743.897.200
1	5	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	2 Unit	100%	Rp97.509.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	572.650.000
1	5	1	1.07	5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	2 Paket	100%	Rp52.447.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	52.447.200
1	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	13 Unit	100%	Rp118.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	118.800.000

1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	100%	3 Unit	100%	Rp68.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	274.450.000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Rp20.739.644.599					21.352.252.850
1	5	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti						Rp20.129.016.599					20.851.624.850
1	5	2	1.01	6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	Rp99.989.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	150.000.000
1	5	2	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Kota Banjarbaru	100%	14 Unit	100%	Rp767.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	565.954.800

1	5	2	1.01	14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	Rp80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	150.000.000
1	5	2	1.01	15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	Rp80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	60.000.000
1	5	2	1.01	16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	Rp774.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	869.643.500

1	5	2	1.01	17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	Rp17.332.778.799	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	17.804.635.750
1	5	2	1.01	18	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	135 Orang	100%	Rp893.878.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	997.890.800
1	5	2	1.01	19	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	Rp100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	253.500.000

1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparat yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah										Rp490.860.000						350.628.000	
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	Rp150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%						125.000.000	
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	Rp125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%							100.000.000

1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	Rp59.820.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%	125.628.000
1	5	2	1.02	6	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	Rp60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%	60.000.000
1	5	2	1.02	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	Rp96.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%	100.000.000
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi									Rp119.768.000					150.000.000

1	5	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Kota Banjarbaru	100%	1 Laporan	100%	Rp50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%	50.000.000
1	5	2	1.03	3	Pembentukan Sekretariat PPNS			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	Rp30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%	50.000.000
1	5	2	1.03	5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	Rp39.768.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	100%	50.000.000
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									Rp2.748.470.000					2.500.000.000

1	5	4	1.01	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Banjarbaru	100%	10 Unit	100%	Rp50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	250.000.000
TOTAL ANGGARAN												Rp40.271.685.269		35.438.465.850		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program, dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 3 (tiga) program urusan wajib kegiatan SKPD dan 1 (satu) program prioritas fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan sub kegiatannya .

Program Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 1. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 4. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 5. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 8. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 2. Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 4. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 5. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
 3. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 2. Pembentukan Sekretariat PPNS
 3. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATANKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN**

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 1. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan

Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		
										Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.863.465.850
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							35.863.465.850
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan						12.011.213.000
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan					23.999.900
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan dan Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%		14.000.000

1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	9.999.900
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel				9.147.900.000
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	8.970.900.000
1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	177.000.000
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani				216.380.000
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	156.380.000
1	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	60.000.000
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani				1.142.684.900
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	48.000.000
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	365.000.000
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	18.697.900
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	11.000.000
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	699.987.000

1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani					743.897.200
1	5	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	572.650.000
1	5	1	1.07	5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	52.447.200
1	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	118.800.000
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani					199.311.000
1	5	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	40.000.000
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	159.311.000
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani					537.040.000
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	262.590.000
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	274.450.000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah						21.352.252.850
1	5	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti					20.851.624.850

1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah					350.628.000
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%		125.000.000
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%		100.000.000
1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%		125.628.000
1	5	2	1.02	6	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%		60.000.000
1	5	2	1.02	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%		100.000.000
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan trantibum					150.000.000
1	5	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%		50.000.000

1	5	2	1.03	3	Pembentukan Sekretariat PPNS			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	50.000.000
1	5	2	1.03	5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Tingkat kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	50.000.000
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran						2.500.000.000
1	5	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil					2.500.000.000
1	5	4	1.01	22	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	200.000.000
1	5	4	1.01	23	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	2.050.000.000
1	5	4	1.01	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	250.000.000
TOTAL ANGGARAN												35.863.465.850

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 merupakan dokumen rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, fungsi rencana kerja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam rencana strategis SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun anggaran 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan.

Banjarbaru, 27 Juni 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a short vertical stroke.

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

Pembina Utama Madya NIP

19650909 198602 1 005

	X.XX.01.1.0 1.01	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah							5	Doku men	15.030. 500	2	Doku men	5.458.8 00	0	Doku men	0	0	Doku men	0	0	Doku men	0	2	Doku men	5.458.8 00	40	36 .3 2	2	Doku men	5.458.8 00	40	36. 32
	X.XX.01.1.0 1.02	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi RKA-SKPD							1	Doku men	4.266.5 00	0	Doku men	670.00 0	0	Doku men	0	0	Doku men	0	0	Doku men	0	0	Doku men	670.00 0	0	15 .7	0	Doku men	670.00 0	0	15. 7
	X.XX.01.1.0 2	Persentase Penyerapan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1 0 0	%	10.384. 483.534	25	%	2.568.7 69.132	0	%	0	0	%	0	0	%	0	25	%	2.568.7 69.132	25	24 .7 4	25	%	2.568.7 69.132	25	24. 74
	X.XX.01.1.0 2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							1 2	Bu lan	10.221. 283.534	3	Bu lan	2.528.8 69.132	0	Bu lan	0	0	Bu lan	0	0	Bu lan	0	3	Bu lan	2.528.8 69.132	25	24 .7 4	3	Bu lan	2.528.8 69.132	25	24. 74
	X.XX.01.1.0 2.02	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1 2	Doku men	163.200. 000	3	Doku men	39.900. 000	0	Doku men	0	0	Doku men	0	0	Doku men	0	3	Doku men	39.900. 000	25	24 .4 5	3	Doku men	39.900. 000	25	24. 45
	X.XX.01.1.0 5.02	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							1	Pa ket	156.380. 000	1	Pa ket	149.68 2.500	0	Pa ket	0	0	Pa ket	0	0	Pa ket	0	1	Pa ket	149.68 2.500	100	95 .7 2	1	Pa ket	149.68 2.500	10	95. 72

	X.XX.01.1.0 5.09	Jumlah Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5	Orang	59.285.000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0	0	Orang	0	0	0
	X.XX.01.1.0 6	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar						100	%	610.500.000	25	%	127.621.674	0	%	0	0	%	0	25	%	127.621.674	25	20.9	25	%	127.621.674	25	20.9
	X.XX.01.1.0 6.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12	Paket	56.202.000	3	Paket	12.889.200	0	Paket	0	0	Paket	0	3	Paket	12.889.200	25	22.93	3	Paket	12.889.200	25	22.93
	X.XX.01.1.0 6.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						12	Paket	21.880.000	3	Paket	4.689.500	0	Paket	0	0	Paket	0	3	Paket	4.689.500	25	21.43	3	Paket	4.689.500	25	21.43
	X.XX.01.1.0 6.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12	Dokumen	9.500.000	3	Dokumen	2.370.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	3	Dokumen	2.370.000	25	24.95	3	Dokumen	2.370.000	25	24.95

	X.XX.01.1.0 6.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1 2	Lapo ran	522.918 .000	3	Lapo ran	107.67 2.974	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	0	Lapo ran	0	3	Lapo ran	107.67 2.974	2 5	20 .5 9	3	Lapo ran	107.67 2.974	25	20. 59	
	X.XX.01.1.0 7	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar							1 0 0	%	723.412 .000	47. 55	%	310.71 7.500	0	%	0	0	%	0	0	%	0	47. 55	%	310.71 7.500	47. 55	42 .9 5	47. 55	%	310.71 7.500	47 .5 5	42. 95	
	X.XX.01.1.0 7.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							1	Un it	361.622 .000	0	Un it	0	0	Un it	0	0	Un it	0	0	Un it	0	0	Un it	0	0	0	0	Un it	0	0	0	
	X.XX.01.1.0 7.05	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							3	Pa ket	53.340. 000	2	Pa ket	14.240. 000	0	Pa ket	0	0	Pa ket	0	0	Pa ket	0	2	Pa ket	14.240. 000	66. 67	26 .7	2	Pa ket	14.240. 000	66 .6 7	26. 7	
	X.XX.01.1.0 7.10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							1 1	Un it	308.450 .000	1	Un it	296.47 7.500	0	Un it	0	0	Un it	0	0	Un it	0	1 1	Un it	296.47 7.500	100 .1 2	96 1	1	Un it	296.47 7.500	10 0	96. 12	
	X.XX.01.1.0 8	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang							1 0 0	%	263.050 .000	26. 29	%	60.508. 500	0	%	0	0	%	0	0	%	0	26. 29	%	60.508. 500	26. 29	23 29	26. 29	%	60.508. 500	26 .2 9	23	

	1.05.02.1.01.06	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						1	Dokumen	341.508.100	0	Dokumen	43.583.820	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	43.583.820	0	12.76	0	Dokumen	43.583.820	0	12.76
	1.05.02.1.01.13	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia						16	Unit	927.273.000	4	Unit	612.460.000	0	Unit	0	0	Unit	0	4	Unit	612.460.000	25	66.05	4	Unit	612.460.000	25	66.05
	1.05.02.1.01.14	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						1	Dokumen	149.999.900	0	Dokumen	13.714.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	13.714.000	0	9.14	0	Dokumen	13.714.000	0	9.14

	1.05.02.1.01 .15	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4	Laporan	60.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0	0	0	
	1.05.02.1.01 .16	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1	Laporan	1.000.000.000	0	Laporan	100.649.600	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	100.649.600	0	10.06	0	Laporan	100.649.600	0	10.06	
	1.05.02.1.01 .17	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,					1 2	Laporan	15.976.635.750	3	Laporan	3.841.933.815	0	Laporan	0	0	Laporan	0	3	Laporan	3.841.933.815	25	24.05	3	Laporan	3.841.933.815	25	24.05	

	1.05.02.1.03.01	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					1	Laporan	110.000.000	0	Laporan	1.149.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	1.149.000	0	1.04	0	Laporan	1.149.000	0	1.04
	1.05.04	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran					62	%	7.116.466.800	20.11	%	1.292.261.276	0	%	0	0	%	0	20.11	%	1.292.261.276	32.44	18.16	20.11	%	1.292.261.276	32.44	18.16
	1.05.04.1.01	Persentase Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					100	%	7.116.466.800	20.11	%	1.292.261.276	0	%	0	0	%	0	20.11	%	1.292.261.276	20.11	18.16	20.11	%	1.292.261.276	20.11	18.16

	1.05.04.1.01.22	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Daerah (Kabupaten/ Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal						1	Dokumen	648.470.000	0	Dokumen	38.796.277	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	38.796.277	0	5.98	0	Dokumen	38.796.277	0	5.98																					
	1.05.04.1.01.23	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota						1	Laporan	3.337.996.800	0	Laporan	1.055.347.999	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	1.055.347.999	0	31.62	0	Laporan	1.055.347.999	0	31.62																					
	1.05.04.1.01.27	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						73	Unit	3.130.000.000	6	Unit	198.117.000	0	Unit	0	0	Unit	0	6	Unit	198.117.000	8.22	6.33	6	Unit	198.117.000	8.22	6.33																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						2.7	14																											

													4	.6							
														4							
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan	SR	S						
														R							
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	20.	18						
														11	.1						
														6							
													Predikat Kinerja Kegiatan	SR	S						
														R							
Program	Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh	40.271.			9.531.9			0			0			0		9.531.9			9.531.9		
		685.269			73.432											73.432			73.432		
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d.			28.	22				
													PROGRAM)			35	.7				
																8					
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)			SR	S				
																	R				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																					
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																					